



## DINAMIKA DAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DALAM PELAKSANAAN ASAS DESENTRALISASI ANTAR DAERAH DI INDONESIA

Atikah Ramadhani<sup>1</sup>, Prita Laura<sup>2</sup>, Theresia Nicky Apika Diangera<sup>3</sup>, Rizky Wahyudi<sup>4</sup>, Rizki Septia Pratiwi<sup>5</sup>, Femas Erlangga Dwi Saputra<sup>6</sup>, Sujatnico<sup>7</sup>, Fina Tri Nur Maharani<sup>8</sup>, Dini Apriliani<sup>9</sup>, Ana Mentari<sup>10</sup>, Febra Anjar Kusuma<sup>11</sup>

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung

Alamat: Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung, Indonesia

Korespondensi penulis: [atikalpg@gmail.com](mailto:atikalpg@gmail.com)

**Abstract.** *Regional development disparities remain a major challenge in the implementation of decentralization in Indonesia. Although fiscal decentralization is designed to strengthen local autonomy and accelerate equitable welfare distribution, in practice it has not yet produced fully balanced outcomes. Therefore, this study aims to analyze the role of fiscal decentralization in influencing regional inequality and to examine strategies that can be implemented to reduce interregional disparities. This research employs a literature study method by reviewing various relevant studies, journals, and scientific sources related to fiscal decentralization, regional inequality, fiscal capacity, and regional development policies. The findings indicate that fiscal decentralization has two contrasting impacts. On one hand, it can improve the effectiveness of public services, promote inclusive economic growth, and provide opportunities for local governments to optimize regional potential. On the other hand, disparities widen in regions with low fiscal capacity due to limited local revenue and suboptimal financial governance. Additionally, central government transfer mechanisms that are not fully performance-based further hinder equitable development. Based on these findings, strategies to reduce inequality include strengthening regional fiscal capacity, developing connectivity-oriented infrastructure, empowering local economies based on regional potential, improving human resource quality, and utilizing technology in local governance. Fiscal decentralization can serve as an important instrument for achieving equitable development when supported by strong governance, adequate fiscal capacity, and comprehensive, sustainable regional development strategies. Without these improvements, decentralization risks exacerbating regional disparities in Indonesia.*

**Keywords:** *Decentralization, Development Inequality, Regional Autonomy, Regional Development.*

**Abstrak.** Ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi persoalan utama dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Meskipun desentralisasi fiskal dirancang untuk memperkuat otonomi daerah dan mempercepat pemerataan kesejahteraan, pada praktiknya pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya memberikan hasil yang merata. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran desentralisasi fiskal dalam memengaruhi ketimpangan daerah serta mengkaji strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi disparitas antar wilayah. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah berbagai penelitian, jurnal, dan sumber ilmiah yang relevan mengenai desentralisasi fiskal, ketimpangan regional, kapasitas fiskal, serta kebijakan pembangunan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki dua sisi. Di satu sisi, kebijakan ini mampu meningkatkan efektivitas layanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, serta memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi lokal. Namun, di sisi lain, ketimpangan semakin melebar pada daerah dengan kapasitas fiskal rendah akibat keterbatasan pendapatan asli daerah dan tata kelola keuangan yang belum optimal. Selain itu, mekanisme transfer pusat yang belum sepenuhnya berbasis kinerja turut memperlambat pemerataan pembangunan. Berdasarkan temuan tersebut, strategi untuk mengurangi ketimpangan meliputi penguatan kapasitas fiskal daerah, pembangunan infrastruktur yang berorientasi konektivitas, pemberdayaan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi fiskal dapat berfungsi sebagai instrumen penting untuk pemerataan pembangunan apabila didukung oleh tata kelola yang baik, kapasitas fiskal yang kuat, serta strategi pembangunan daerah yang

menyeluruh dan berkelanjutan. Tanpa perbaikan tersebut, desentralisasi justru berisiko memperbesar ketimpangan antar wilayah di Indonesia.

**Kata Kunci:** Desentralisasi, Ketimpangan Pembangunan, Otonomi Daerah, Pembangunan Daerah.

## **PENDAHULUAN**

Sejak tahun 1999, Indonesia telah mengimplementasikan prinsip desentralisasi atau pemberian otonomi kepada pemerintah daerah sebagai komponen dari reformasi politik. Pendekatan ini mendesain agar otoritas yang lebih signifikan diserahkan kepada entitas pemerintahan lokal untuk mengelola urusan internal mereka. Sasaran fundamental dari desentralisasi adalah untuk memfasilitasi distribusi pembangunan yang lebih adil, mendekatkan administrasi publik kepada warga negara, dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di segenap penjuru negeri. Akan tetapi, realitanya menunjukkan bahwa setelah lebih dari dua dekade penerapan desentralisasi, ekspektasi mengenai pemerataan pembangunan tersebut belum tercapai sepenuhnya. Beberapa wilayah mengalami kemajuan pesat dengan ketersediaan infrastruktur yang representatif, dinamika ekonomi yang positif, dan populasi yang makmur. Sebaliknya, wilayah lain masih tertinggal dengan keterbatasan fasilitas, pertumbuhan ekonomi yang stagnan, serta prevalensi kemiskinan yang signifikan<sup>1</sup>.

Wilayah-wilayah dengan potensi ekonomi yang lebih besar, seperti provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan beberapa area di Pulau Sumatera, cenderung mencatat pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan wilayah lainnya. Sebaliknya, wilayah-wilayah di bagian timur Indonesia, mencakup Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara, masih bergulat dengan kendala signifikan terkait pengembangan infrastruktur, keterjangkauan pendidikan, layanan kesehatan, dan sarana publik lainnya. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa dampak positif dari desentralisasi belum merata dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah pusat memang mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil. Akan tetapi, dalam implementasinya, terdapat banyak daerah yang belum sanggup memanfaatkan dana tersebut secara efektif. Dengan demikian, menjadi krusial untuk melakukan telaah mendalam mengenai dinamika desentralisasi di Indonesia serta menganalisis faktor-faktor penyebab berkelanjutan ketimpangan. Pembangunan antar daerah<sup>2</sup>.

## **KAJIAN TEORITIS**

**1. Desentralisasi.** Desentralisasi merupakan konsep pemerintahan yang berkaitan dengan proses. Distribusi kekuasaan, wewenang, dan sumber daya dari pemerintah pusat kepada. Pemerintah daerah atau unit-unit organisasi yang lebih rendah<sup>3</sup>. Kekuasaan serta penyerahan kewenangan pemerintahan kepada unit lokal sehingga pengambilan keputusan lebih dekat dengan masyarakat yang terdampak oleh kebijakan tersebut<sup>4</sup>. Desentralisasi tidak hanya sekadar memindahkan kantor pusat ke daerah, melainkan memberikan kewenangan substantif kepada unit di tingkat bawah untuk mengambil keputusan sesuai kebutuhan wilayahnya.

---

<sup>1</sup> Sekar Dewinda Santi and Doddy Aditya Iskandar, "KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN KETIMPANGAN CAPAIAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI INDONESIA Sekar," *Jurnal Syntax Admiration* 2, no. 3 (2021): 490–506.

<sup>2</sup> Hari Suriadi et al., "Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah* 18, no. 1 (2024): 27–36.

<sup>3</sup> Guntoro Mohamad, "Desentralisasi Dan Otonomi Daerah," n.d., 1–9.

<sup>4</sup> Alfariid Fadhil Rachmad et al., "Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah," *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 75–88.

- 2. Pemerintahan Daerah.** Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi UUD 1945 Pasal 18 mengatur bahwa provinsi, kabupaten, dan kota memiliki DPRD dan dipimpin oleh Gubernur, Bupati, atau Wali Kota sebagai kepala daerah<sup>5</sup>
- 3. Pembangunan dan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah.** Pembangunan secara umum merupakan suatu proses perubahan yang disengaja untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek<sup>6</sup>. Ketimpangan pembangunan adalah kondisi ketika terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat pembangunan antar wilayah dalam satu negara<sup>7</sup>. Ketimpangan ini dapat dilihat melalui indikator seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat kemiskinan, akses terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)<sup>8</sup>.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan baru yang dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur secara statistik atau cara lainnya dari suatu kuantifikasi (pengukuran)<sup>9</sup>. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis yang digunakan adalah dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta dari hasil kajian teori penelitian atau sumber media massa yang sudah pernah diterbitkan. Analisis data dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, dapat diukur, dan diarahkan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Metode ini memiliki. Karakteristik yang spesifik, dengan tahapan yang sistematis, terencana, dan terstruktur secara jelas sejak tahap perancangan hingga pelaksanaan penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Dinamika Implementasi Asas Desentralisasi di Indonesia**

Implementasi asas desentralisasi di Indonesia merupakan proses panjang yang tidak berjalan mulus. Pada awalnya, desentralisasi dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah, dan mengurangi dampak sentralisasi yang terlalu dominan. Namun perjalanan historis menunjukkan bahwa desentralisasi kerap melahirkan dilema baru dan persoalan yang rumit. Pada masa Orde Baru, desentralisasi hanya terjadi secara terbatas melalui UU No. 5 Tahun 1974 yang menempatkan pemerintah pusat sebagai pengendali utama sehingga daerah hanya bertindak sebagai

---

<sup>5</sup> Muhammad Rizqi Afandi, Kamdani, and Ardiansyah, "Otonomi Daerah Sebuah Kajian Literature Review," *JOURNAL OF LITERATURE REVIEW* 1, no. 1 (2025): 211–17.

<sup>6</sup> Nelly Lestari et al., "Teori Pembangunan Ekonomi," *Jurnal Manajemen Bisnis Islam* 2, no. 2 (2021): 113–28.

<sup>7</sup> Ingli Intan Hadju, Vecky A.J Masinambow, and Mauna Th.B Maramis, "ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 21, no. 01 (2021): 110–20.

<sup>8</sup> Bagus Wijaya Tirta and Risqi Noor Hidayati Putri, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Timur," *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 18, no. 2 (2025): 1500–1511.

<sup>9</sup> M Makhrus Ali et al., "Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapan Nya Dalam Penelitian," *Education Journal* 2, no. 2 (2022).

pelaksana. Reformasi kemudian melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 yang memberikan kewenangan operasional lebih luas kepada daerah, tetapi kesiapan daerah yang belum matang memunculkan konflik antara kepala daerah dan DPRD, lemahnya pengawasan publik, serta tarik-menarik politik yang justru menghambat terwujudnya demokrasi lokal yang sehat.

Perkembangan berikutnya ditandai dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 yang menggeser pendekatan *ultra vires doctrine* menuju *residual power*, yaitu memberikan kewenangan kepada daerah atas seluruh urusan kecuali urusan absolut pemerintah pusat. Pendekatan ini lebih sesuai dengan prinsip otonomi luas, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya menunjukkan kedewasaan desentralisasi. Di banyak daerah, otonomi justru dimanfaatkan oleh elit lokal untuk memperluas pengaruh politik dan ekonomi. Indikator seperti rendahnya proporsi belanja langsung dalam APBD, kurangnya inovasi kebijakan, dan ketidakmampuan daerah merumuskan persoalan kesejahteraan menunjukkan bahwa desentralisasi belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat<sup>10</sup>. Fenomena seperti korupsi di tingkat daerah, politisasi birokrasi, serta inefisiensi tata kelola semakin memperlihatkan bahwa perluasan kewenangan tanpa pembenahan kelembagaan dapat membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan. Dalam kondisi demikian, desentralisasi berpotensi menjadi sekadar pemindahan fokus kekuasaan dari pusat ke daerah tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Meskipun demikian, perjalanan panjang desentralisasi di Indonesia tidak dapat dikatakan gagal sepenuhnya. Beberapa daerah mampu menunjukkan kemajuan melalui inovasi pelayanan publik, meningkatnya transparansi, serta tumbuhnya kompetisi kebijakan yang positif. Hanya saja capaian tersebut belum merata dan belum cukup kuat untuk mengimbangi berbagai kelemahan yang muncul.

## **B. Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah di Indonesia**

Ketimpangan pembangunan antar daerah di Indonesia merupakan masalah mendalam yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial, politik, dan struktural. Beberapa wilayah seperti Jawa, Bali, dan sebagian Sumatera telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional, sementara kawasan lain seperti Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku masih mengalami ketertinggalan signifikan. Kesenjangan ini telah berlangsung lama dan memiliki akar historis yang kuat, mulai dari masa kolonial hingga era pembangunan modern. Dalam konteks kontemporer, data empiris menunjukkan bahwa ketimpangan antar provinsi masih berada pada kategori tinggi, sebagaimana terlihat dari nilai Indeks Williamson pada tahun 2015–2018 yang mendekati angka 1, menandakan disparitas yang serius.

Perbedaan kapasitas ekonomi antarwilayah menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan tersebut. Wilayah dengan struktur ekonomi lebih matang ditunjang industri, pusat perdagangan, dan jaringan transportasi lebih cepat tumbuh dan lebih mampu menarik investasi. Sebaliknya, wilayah yang bergantung pada sektor primer masih menghadapi volatilitas harga komoditas, rendahnya nilai tambah, serta minimnya diversifikasi ekonomi. Data PDRB per kapita yang menunjukkan bahwa dari 33 provinsi, hanya tujuh yang berada di atas rata-rata nasional, sementara sisanya berada jauh tertinggal. Sebaran PDRB yang

---

<sup>10</sup> Pupitasari Larasati Genoveva, "IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Genoveva," *Jurnal Komunikasi Hukum* 8 (2022): 244–51.

menyimpang lebar dari rata-rata menandakan bahwa kue pembangunan hanya dinikmati oleh wilayah tertentu, meninggalkan daerah lain dalam kondisi stagnan atau pertumbuhan lamban<sup>11</sup>.

Ketimpangan juga dipengaruhi secara kuat oleh kualitas sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbukti memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan, artinya semakin baik kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup suatu daerah, semakin kecil ketimpangan antarwilayah. Daerah dengan IPM tinggi memiliki produktivitas yang lebih baik, tenaga kerja lebih kompetitif, serta kapasitas inovasi yang lebih besar. Sebaliknya, daerah dengan IPM rendah mengalami lingkaran setan pembangunan. Rendahnya pendidikan menurunkan produktivitas, rendahnya produktivitas melemahkan daya tarik investasi, dan minimnya investasi membuat daerah tetap tertinggal. Ketimpangan kualitas SDM ini turut diperkuat oleh minimnya fasilitas pendidikan dan kesehatan di banyak daerah periphery, di mana kapasitas birokrasi dan mutu tenaga kerja merupakan hambatan penting dalam efektivitas pembangunan daerah.

Infrastruktur adalah variabel lain yang sangat menentukan, namun efeknya tidak selalu linear. Infrastruktur yang memengaruhi ekonomi daerah bukan hanya jalan nasional, melainkan juga jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, jembatan, pelabuhan, bandara, serta layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi. Distribusi infrastruktur di Indonesia masih sangat timpang, Pulau Jawa memiliki jaringan transportasi paling lengkap, sementara banyak daerah di timur Indonesia masih terisolasi secara fisik. Keterisolasian ini memperlambat arus barang dan jasa, membatasi akses pasar, dan menurunkan daya tarik investasi.

Kebijakan desentralisasi yang awalnya diharapkan mampu mengurangi ketimpangan justru menunjukkan hasil yang terbatas. Meskipun daerah memiliki otonomi lebih besar dalam merencanakan pembangunan, tidak semua daerah memiliki kemampuan birokrasi, SDM, dan kapasitas fiskal untuk memanfaatkan kewenangan tersebut. Daerah dengan aparatur pemerintah berkualitas tinggi dapat merancang kebijakan pembangunan efektif, sementara daerah dengan birokrasi lemah dan sumber daya minim tetap tertinggal. Kesenjangan kualitas tata kelola semakin memperbesar ketimpangan karena daerah yang kuat menjadi semakin mandiri, sedangkan daerah lemah terus bergantung pada dana pusat seperti DAU dan DAK.

Ketimpangan juga dipengaruhi oleh faktor geografis dan sejarah ekonomi wilayah. Daerah seperti Papua, Maluku, dan NTT memiliki hambatan geografis yang sulit, seperti kondisi kepulauan, pegunungan, dan keterbatasan akses antarwilayah. Hambatan ini tidak hanya meningkatkan biaya logistik, tetapi juga membatasi interaksi ekonomi serta memperlambat distribusi pembangunan. Sementara itu, daerah seperti Jawa secara historis telah menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan sejak era kolonial, sehingga pembangunannya lebih dulu dan lebih cepat berkembang. Akumulasi modal historis ini menciptakan ketimpangan struktural yang tidak mudah diperbaiki dalam jangka pendek.

Ketimpangan pembangunan antar daerah juga memunculkan berbagai dampak sosial. Urbanisasi besar-besaran dari daerah miskin ke daerah kaya menjadi fenomena yang tidak terelakkan. Banyak masyarakat dari wilayah periphery bermigrasi ke kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, atau akses layanan publik yang lebih baik. Namun, urbanisasi ini memunculkan masalah baru seperti kepadatan

---

<sup>11</sup> Anin Nabail Azim, Hady Sutjipto, and Rah Adi Fahmi Ginanjar, "Determinan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Provinsi Di Indonesia," *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi* 2, no. 1 (2022): 1–16.

penduduk, kemiskinan kota, permukiman kumuh, dan beban layanan publik. Ketimpangan yang dibiarkan berlarut-larut dapat memicu konflik sosial, ketidakpuasan masyarakat, hingga munculnya gerakan politik identitas.

Selain itu, ketimpangan memengaruhi efektivitas pembangunan nasional secara keseluruhan. Potensi ekonomi daerah tertinggal tidak dimanfaatkan dengan maksimal, padahal banyak daerah tersebut memiliki sumber daya alam melimpah, mulai dari pangan, mineral, hingga energi. Keterbatasan modal, infrastruktur, dan SDM membuat daerah tersebut hanya menjadi pemasok bahan mentah tanpa mendapatkan nilai tambah. Akibatnya, kontribusi terhadap PDB nasional tetap rendah, dan daerah penghasil sumber daya justru tidak memperoleh manfaat optimal dari kekayaan alamnya.

Teori *trickle-down effect* yang menyatakan bahwa pertumbuhan di daerah maju akan mengalir ke daerah tertinggal ternyata tidak terjadi secara nyata di Indonesia. Pusat pertumbuhan seperti Jawa tetap mendominasi, sementara daerah pinggiran hanya menerima dampak minimal. Aliran modal, tenaga kerja, dan inovasi tidak secara otomatis tersebar ke wilayah yang kurang berkembang. Bahkan, ketergantungan ekonomi justru menguat karena daerah tertinggal tetap bergantung pada pusat dalam hal akses pasar dan lapangan kerja.

Dengan demikian, ketimpangan pembangunan antar daerah di Indonesia bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi merupakan masalah struktural yang dipengaruhi oleh kapasitas fiskal, kualitas manusia, ketimpangan infrastruktur, konsentrasi investasi, dan efektivitas desentralisasi. Kedua jurnal yang dianalisis menunjukkan bahwa tanpa upaya pemerataan yang terarah, konsisten, dan didukung kebijakan fiskal yang berpihak pada daerah tertinggal, kesenjangan antarwilayah akan sulit teratasi.

### **C. Dampak Desentralisasi terhadap Kualitas Pembangunan Daerah**

Pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah dapat dilihat melalui dua aspek utama, yaitu output dan outcomes. Output kebijakan mencakup pertumbuhan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta fleksibilitas program pembangunan<sup>12</sup>. Sementara itu, outcomes merujuk pada sejauh mana hasil pelaksanaan kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Karena itu, penting menilai apakah kewenangan dan anggaran yang diberikan benar-benar meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan memperbaiki kualitas layanan publik. Adapun dampak desentralisasi terhadap kualitas pembangunan daerah dapat dilihat melalui empat aspek berikut:

#### **1) Pertumbuhan Ekonomi**

Desentralisasi fiskal memberi peluang bagi daerah untuk mempercepat pembangunan ekonomi melalui investasi infrastruktur dan program daerah. Namun studi Farida, Suman & Sakti (2021)<sup>13</sup> menunjukkan bahwa di 13 provinsi Indonesia Timur, belanja produktif masih rendah dan kapasitas SDM perencanaan lemah sehingga kewenangan besar tidak otomatis meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kapasitas daerah menjadi faktor penentu kualitas pembangunan ekonomi.

---

<sup>12</sup> Muhammad Mujtaba Habibi, "ANALISIS PELAKSANAAN DESENTRALISASI DALAM OTONOMI DAERAH KOTA / KABUPATEN," *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, no. 5 (2015).

<sup>13</sup> Hasna Faridah and Rahmi Hayati, "Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Nikah Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketangapan) Pada Kantor Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong," *Japb* 4, no. 2 (2021): 1041–51.

**2) Pemerataan dan Ketimpangan Wilayah**

Walaupun salah satu tujuan desentralisasi adalah pemerataan, ketimpangan pembangunan di Indonesia masih tinggi. Daerah yang tertinggal sering tidak mampu memanfaatkan kewenangan dan sumber daya secara optimal karena keterbatasan infrastruktur dan SDM. Tanpa dukungan khusus, ketimpangan dapat tetap atau bahkan meningkat.

**3) Pelayanan Publik dan Kapasitas Daerah**

Kualitas pembangunan daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan program, mengelola anggaran, dan menjalankan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Kapasitas institusional lokal, tata kelola, serta kualitas lembaga pemerintahan menjadi faktor penentu keberhasilan desentralisasi<sup>14</sup>. Kapasitas yang lemah membuat hasil layanan publik tetap terbatas meskipun kewenangan sudah diberikan.

**4) Kapasitas Pemerintah Daerah dan Tata Kelola**

Kewenangan dan anggaran tidak cukup tanpa tata kelola yang baik. Tantangan regulasi, lemahnya pengawasan, dan kualitas institusi yang belum optimal dapat menurunkan efektivitas pembangunan. Desentralisasi yang tidak didukung penguatan institusi justru dapat memperburuk korupsi, pelayanan publik, dan efisiensi anggaran. Karena itu, peningkatan akuntabilitas dan tata kelola lokal merupakan syarat utama agar desentralisasi berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah.

**D. Peran Desentralisasi Fiskal dalam Memengaruhi Ketimpangan**

Desentralisasi fiskal memberi pemerintah daerah kontrol lebih besar atas anggaran, yang berpotensi meningkatkan pemerataan pelayanan publik. Namun, kebijakan ini juga dapat memperlebar ketimpangan jika diterapkan di daerah yang kapasitas fiskalnya lemah. Karena itu, memahami bagaimana desentralisasi fiskal dapat mengurangi sekaligus meningkatkan ketimpangan menjadi penting dalam menilai efektivitas otonomi daerah.

**1) Desentralisasi Fiskal Dapat Mengurangi Ketimpangan**

Desentralisasi fiskal dapat mengurangi ketimpangan ketika daerah mampu mengelola kewenangan anggarannya dengan baik. Otonomi memungkinkan kebijakan yang lebih sesuai kebutuhan masyarakat sehingga layanan publik menjadi lebih efektif dan kesenjangan antarwilayah menurun. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa daerah yang memaksimalkan potensi sumber daya lokal, melakukan inovasi fiskal, serta menyusun strategi pendapatan yang kuat mampu menurunkan disparitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif<sup>15</sup>.

**2) Desentralisasi Fiskal Dapat Meningkatkan Ketimpangan**

Di sisi lain, desentralisasi fiskal dapat memperburuk ketimpangan karena perbedaan kapasitas fiskal yang besar antarwilayah. Daerah kaya mampu menyediakan layanan publik yang lebih baik, sementara daerah dengan PAD rendah tetap bergantung pada transfer pusat. Ketimpangan ini diperbesar oleh mekanisme dana transfer yang kurang

---

<sup>14</sup> Adfin Rochmad Baidhowah, "Explaining Decentralization Performance in Indonesia," *Jurnal Bina Praja* 14 (2022): 97–109.

<sup>15</sup> Muhammad Kurniawan, Heni Noviarita, and Yuyun Anriyani, "PENGARUH KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DAN PERGESERAN SEKTORAL TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH AREA SUMBAGSEL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2015-2023," *EDUNOMIKA* 09, no. 02 (2025): 1–14.

fleksibel serta ketimpangan kemampuan perencanaan dan administrasi. Penelitian menunjukkan bahwa wilayah yang maju memperoleh manfaat lebih besar dari desentralisasi, sementara daerah tertinggal semakin terpinggirkan<sup>16</sup>.

**E. Strategi Mengurangi Ketimpangan Daerah dan Rekomendasi Kebijakan**

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia bertujuan memberi kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah agar dapat mengelola potensi wilayah secara mandiri. Otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia secara optimal. Namun, perbedaan kapasitas, akses, dan struktur ekonomi antarwilayah menyebabkan hasil desentralisasi belum merata. Karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang menyeluruh agar desentralisasi mampu menekan ketimpangan sekaligus memperkuat kemandirian daerah<sup>17</sup>.

**1) Penguatan Kapasitas Fiskal dan Tata Kelola Daerah**

Ketimpangan banyak dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan fiskal. Daerah dengan PAD tinggi cenderung lebih mampu menyediakan layanan publik dibanding daerah dengan pendapatan kecil. Upaya yang perlu dilakukan meliputi peningkatan kualitas perencanaan anggaran, optimalisasi pendapatan lokal secara bijak, serta perbaikan akuntabilitas keuangan. Tata kelola yang efisien dan transparan akan memperkuat kapasitas daerah dalam menyediakan layanan publik dan pada akhirnya mengurangi kesenjangan antarwilayah.

**2) Pengembangan Infrastruktur Berbasis Konektivitas Antarwilayah**

Kesenjangan pembangunan juga dipicu oleh minimnya infrastruktur dasar, terutama di daerah tertinggal. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus memastikan konektivitas antardaerah agar mobilitas ekonomi dan akses terhadap layanan publik meningkat. Pembangunan jalan, transportasi, dan fasilitas publik yang merata menjadi kunci dalam mendorong pemerataan dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat.

**3) Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Daerah**

Pemerintah daerah perlu memperkuat perekonomian lokal melalui pengembangan UMKM, peningkatan akses permodalan, pelatihan keterampilan, dan perluasan jaringan usaha. Pendekatan ini dapat meningkatkan daya saing ekonomi lokal sekaligus membuka lapangan kerja baru. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk memastikan kebijakan tepat sasaran. Ketika potensi daerah dikelola secara berkelanjutan, pendapatan masyarakat meningkat dan ketimpangan perlahan menurun<sup>18</sup>.

Pemerintah daerah juga memiliki peran besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. SDM yang unggul akan mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi daerah<sup>19</sup>. Di era digital, pemanfaatan teknologi perlu diperkuat untuk

---

<sup>16</sup> Mawar Runiasih and Masduki Ahmad, "KETIMPANGAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ANTAR DAERAH DI INDONESIA: KAJIAN LITERATUR TERHADAP DESENTRALISASI FISKAL DAN PEMERATAAN AKSES," *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN* 10, no. 2 (2025): 839–43.

<sup>17</sup> Saeful Kholik, "PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 6, no. 1 (2020).

<sup>18</sup> Suhardi and Polma Panjaitan, "Analisis Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi / JIMBE* 3, no. 1 (2025): 42–55.

<sup>19</sup> Edison, "PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN SOSIAL: TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA," *JURNAL DEVELOPMENT V* 11, no. 2 (2023): 134–47.



meningkatkan efektivitas layanan publik, transparansi, dan efisiensi administrasi. Inovasi di sektor pertanian, industri, maupun layanan berbasis teknologi dapat membuka peluang ekonomi baru yang memperkuat ketahanan daerah. Secara keseluruhan, pengurangan ketimpangan membutuhkan strategi yang terintegrasi, meliputi penguatan fiskal, perbaikan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan SDM, dan pemanfaatan teknologi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi faktor kunci dalam menciptakan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh daerah.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan asas desentralisasi di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan antar daerah. Di satu sisi, desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola potensi wilayah secara mandiri, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan setiap daerah dalam memanfaatkan otonomi tidaklah setara, sehingga menghasilkan dinamika pembangunan yang berbeda-beda. Di sisi lain, desentralisasi juga berpotensi memperbesar ketimpangan antar wilayah akibat perbedaan Pendapatan Asli Daerah, kualitas tata kelola keuangan, kapasitas perencanaan, serta akses terhadap infrastruktur dan sumber daya ekonomi. Daerah yang kuat secara fiskal cenderung mengalami perkembangan lebih pesat, sementara daerah dengan kapasitas terbatas masih bergantung pada transfer pusat dan menghadapi kesenjangan layanan publik. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketimpangan, diperlukan strategi yang lebih komprehensif seperti penguatan kapasitas fiskal, pembangunan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan langkah tersebut, desentralisasi dapat berjalan lebih efektif sebagai instrumen pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afandi, Muhammad Rizqi, Kamdani, and Ardiansyah. "Otonomi Daerah Sebuah Kajian Literature Review." *JOURNAL OF LITERATURE REVIEW* 1, no. 1 (2025): 211–17.
- Ali, M Makhrus, Tri Hariyati, Meli Yudestia Pratiwi, and Siti Afifah. "Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapan Nya Dalam Penelitian." *Education Journal* 2, no. 2 (2022).
- Azim, Anin Nabail, Hady Sutjipto, and Rah Adi Fahmi Ginanjar. "Determinan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Provinsi Di Indonesia." *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi* 2, no. 1 (2022): 1–16.
- Baidhowah, Adfin Rochmad. "Explaining Decentralization Performance in Indonesia." *Jurnal Bina Praja* 14 (2022): 97–109.
- Edison. "PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN SOSIAL: TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA." *JURNAL DEVELOPMENT* 11, no. 2 (2023): 134–47.
- Faridah, Hasna, and Rahmi Hayati. "Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Nikah Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketangapan) Pada Kantor Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong." *Japb* 4, no. 2 (2021): 1041–51.
- Genoveva, Pupitasari Larasati. "IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Genoveva." *Jurnal Komunikasi Hukum* 8 (2022): 244–51.
- Habibi, Muhammad Mujtaba. "ANALISIS PELAKSANAAN DESENTRALISASI DALAM

- OTONOMI DAERAH KOTA / KABUPATEN.” *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, no. 5 (2015).
- Hadju, Ingli Intan, Vecky A.J Masinambow, and Mauna Th.B Maramis. “ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 21, no. 01 (2021): 110–20.
- Kholik, Saeful. “PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 6, no. 1 (2020).
- Kurniawan, Muhammad, Heni Noviarita, and Yuyun Anriyani. “PENGARUH KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DAN PERGESERAN SEKTORAL TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH AREA SUMBAGSEL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2015-2023.” *EDUNOMIKA* 09, no. 02 (2025): 1–14.
- Lestari, Nelly, Putri Aisha Pasha, Merisa Oktapianti, and Nnanda Oktariani. “Teori Pembangunan Ekonomi.” *Jurnal Manajemen Bisnis Islam* 2, no. 2 (2021): 113–28.
- Mohamad, Guntoro. “Desentralisasi Dan Otonomi Daerah,” n.d., 1–9.
- Rachmad, Alfarid Fadhil, Qika Nur Xusan, Nabillah Azzahra, and Ezra Azaria. “Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah.” *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 75–88.
- Runiasih, Mawar, and Masduki Ahmad. “KETIMPANGAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ANTAR DAERAH DI INDONESIA: KAJIAN LITERATUR TERHADAP DESENTRALISASI FISKAL DAN PEMERATAAN AKSES.” *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN* 10, no. 2 (2025): 839–43.
- Santi, Sekar Dewinda, and Doddy Aditya Iskandar. “KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN KETIMPANGAN CAPAIAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI INDONESIA Sekar.” *Jurnal Syntax Admiration* 2, no. 3 (2021): 490–506.
- Suhardi, and Polma Panjaitan. “Analisis Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Nasional.” *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi / JIMBE* 3, no. 1 (2025): 42–55.
- Suriadi, Hari, Aldri Frinaldi, Lince Magriasti, and Lara Indah Yandri. “Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah* 18, no. 1 (2024): 27–36.
- Tirta, Bagus Wijaya, and Risqi Noor Hidayati Putri. “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Timur.” *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 18, no. 2 (2025): 1500–1511.